

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah program aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2003 untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (BPKP, 2021a). Pada Tahun 2020, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah diperbarui menjadi Sistem Informasi Manajamen Daerah *Next-Generation* (SIMDA *Next-G*) atau bisa disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah *Financial Management Information System* (SIMDA FMIS). Berdasarkan pada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CACM), dan *Cash Management System* (CMS), karena sistemnya yang berbasis *website* oleh kementerian (BPKP, 2021a).

Undang-Undang Keuangan Negara UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan penyelenggaraan *good governance*. Asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) dan transparansi (*Transparency*) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan.

Adapun tujuan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu (BPKP, 2021a):

1. Membantu Pemerintah Daerah membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja tata kelola yang baik dalam pengendalian transaksi sekaligus informasi yang memadai.
2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) bersifat generik atau dapat digunakan di seluruh Pemerintah Daerah supaya tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang *relative* tinggi.
3. Menyediakan *Database* mengenai kondisi di daerah yang jauh lebih maju dari aspek keuangan, aspek daerah, kinerja daerah, aparatur daerah serta pelayanan publik yang bisa digunakan sebagai penilaian kinerja instansi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan teknologi informasi dalam laporan keuangan daerah.

SIMDA *Next-G* mengintegrasikan SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan. SIMDA sebelumnya (SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9), masih harus menginput ulang anggaran, karena sistemnya belum terintegrasi dan menggunakan aplikasi berbeda. SIMDA ini hanya untuk SIMDA Keuangan yang di input oleh bagian Akuntansi SKPD dan SKPKD (Rakhmawati, 2022). Sementara SIMDA Perencanaan menggunakan *e-planning integrated* atau SIPD, tergantung pilihan aplikasinya oleh Pemerintah Daerah. Namun pada Tahun 2022, sudah tidak ada lagi pemerintah daerah yang menggunakan *e-planning integrated*, karena daerah diwajibkan mengaplikasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Rakhmawati, 2022). Selain itu, terkait SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), karena data yang besar dan sistem penatausahaan yang berbeda, maka hingga saat ini menggunakan aplikasi sendiri. Pada Tahun 2022, SIMDA BMD belum ada dalam SIMDA *Next-G*. Demikian dengan SIMDA Pendapatan, yang lebih banyak tidak digunakan daerah, karena kurang *update* dengan regulasi. Begitupun SIMDA SAKIP, sudah masuk dalam SIMDA Perencanaan (Rakhmawati, 2022).

masih kurang pemahaman Sistem Informasi Manajemen Daerah karena aplikasi ini masih sangat baru dan memerlukan penyesuaian serta peninjauan ulang mengenai Aplikasi SIMDA *Next-G* untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Kotabaru terutama pada bidang anggaran Pemerintah Daerah masih minim melakukan sosialisasi mengenai Sistem Aplikasi SIMDA ini, sehingga minat dalam meningkatkan kemampuan, serta media informasi membuat menurunnya efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kerja anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah (BPKP, 2021a). Pemerintah Daerah Kab.Kotabaru pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru sudah menerapkan Aplikasi SIMDA *Next-G* dimulai pada semester ke-2 sektor awal Bulan Juli Tahun 2022. Dikarenakan belum sempurnanya sistem Penatausahaan pada SIPD yang dikelola. Setidaknya beberapa fitur pada Aplikasi SIMDA *Next-G* yang wajib mendapatkan prioritas dalam hal penyempurnaan dan memperbarui Sistem oleh Tim Pengembang BPKP untuk menunjang operasional Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian terdahulu dari Rakhmawati (2022) dari segi *sustainability*, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil. Namun dari segi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Aplikasi SIMDA *Next-G* lebih baik, walaupun masih terus melalui update.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Next-G* terhadap Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.

## **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah aplikasi SIMDA *Next-G* memiliki kekurangan dalam melakukan pelaporan keuangan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru?
2. Apakah terdapat kendala dalam aplikasi SIMDA *Next-G* pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru?
3. Apakah aplikasi SIMDA *Next-G* sudah efektif digunakan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru?
4. Apakah aplikasi SIMDA *Next-G* sudah efisien digunakan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru?
5. Bagaimana solusi kendala dalam Aplikasi SIMDA *Next-G* Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kekurangan Aplikasi SIMDA *Next-G* dalam pelaporan keuangan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pada penerapan Aplikasi SIMDA *Next-G* pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.
3. Untuk menganalisis seberapa efektif aplikasi SIMDA *Next-G* pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.

4. Untuk mengetahui apakah aplikasi SIMDA *Next-G* sudah efisien secara optimal pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.
5. Untuk mengetahui solusi kekurangan dan kendala pada Aplikasi SIMDA *Next-G* Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotabaru.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Aplikasi SIMDA *Next-G*.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan oleh penelitian selanjutnya tentang Penerapan Sistem Aplikasi SIMDA *Next-G* karena permasalahan ini masih sangat baru.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kepada Tim Pengembang (BPKP) untuk penyempurnaan sistem Aplikasi SIMDA *Next-G*.

##### **b. Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah pengetahuan, faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan mengenai Aplikasi SIMDA *Next-G* untuk digunakan dalam dunia kerja di Pemerintahan Daerah. Menambah pengetahuan mengenai peningkatan perangkat lunak melalui penggunaan Aplikasi SIMDA.

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

1. Dapat menambah wawasan dan meningkatkan penggunaan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik di masa yang akan datang.

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan aplikasi SIMDA *Next-G* dengan efisien dan meningkatkan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah instansi dalam otonomi daerah.
3. Dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman tentang Aplikasi SIMDA *Next-G* dan sebagai alternatif solusi suatu permasalahan pada Aplikasi SIMDA *Next-G*.